

Redefinisi 'Biennale Jogja'

SEBAGAI perhelatan rutin dua tahunan bidang seni rupa yang membawa predikat Yogya, 'Biennale Jogja' tentu merupakan *event* yang ditunggu insan seni rupa. Apalagi 'Biennale Jogja' tahun ini adalah yang ke-13, berarti sudah lebih dari sepelempat abad diselenggarakan. Tapi apa daya, mahluk yang ditunggu itu menampakkan dirinya dengan sosok yang membuat kita semua mengernyitkan dahi.

Tema yang kedengaran absurd, *Hacking Conflict*, Bertolak Bersanding, *Indonesia Meets Nigeria*, bukan mencerminkan kedahsyatan seni rupa kontemporer yang diusung. Rasanya justru menjauhkan *audience* dari tidak hanya karya-karya yang dipamerkan melainkan juga mengasingkan *event* 'Biennale Jogja' XIII secara keseluruhan. Ada buku panduan, tetapi tidak banyak menolong untuk memahami hubungan antara tema dengan karya-karya yang ada. Artikel singkat ini ingin menjelajah lebih jauh mengenai: apakah Biennale kali ini masih pantas dengan embel-embel Jogja? Atau perlukah kita mendefinisikan ulang pengertian 'Biennale Jogja'?

Retorika Mengada-ada

Sebenarnya tidak ada salahnya program tingkat provinsi dibentang melampaui batas negara bahkan batas antarbenua. Dalam ilmu hubungan internasional ada konsep yang namanya Para Diplomasi yang memungkinkan aktor subnasional (pemerintah daerah, LSM maupun individual) untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar negeri. Tetapi tentu dengan visi misi yang jelas, juga terukur *impact*-nya. Visi, misi program yang jelas menguntungkan kedua belah pihak, terutama pihak penyelenggaranya.

Konsep inilah yang pada umumnya digunakan untuk mengapresiasi 'Biennale Jogja' XII ini. Setiap orang wajar menanyakan apa untungnya mengadakan Biennale Jogja yang beanya mahal itu kalau karya-karyanya sangat sulit dipahami makna maupun visinya.

Dari sejak awal, Festival Ekuator yang menjadi program jangka panjang 'Biennale Jogja' terasa hanya jadi retorika yang mengada-ada. Pilihan ekuator lebih mencerminkan citra Indo-

Tulus Warsito

nesia daripada tentang ke-Jogja-an. Kalaupun itu dianggap wajar, mengapa program-programnya harus dikaitkan dengan ekuator secara global. Kalau panitia menganggap perlu menandingi dominasi Barat, mengapa hanya diartikan sebagai persoalan geografis? Mestinya perhelatan besar (yang didukung pemerintah, dengan menggunakan uang rakyat) pengembangannya sebaiknya didasarkan pada perburuan keunggulan. Sedangkan penjelajahan berbasis geografis umumnya hanya mendapati keunikan-keunikan.

Kalau bicara keunikan, tiap tempat punya keunikannya masing-masing. Perlu dicatat bahwa keunikan tidak selalu berarti keunggulan. Kalau ingin berburu kreativitas yang unggul, objeknya adalah manusia dan lingkungan peradabannya. Di 'Biennale Jogja' seolah-olah ingin ditegaskan bahwa penciptaan karya melalui riset, berdasar survey, dan yang kedengaran ilmiah adalah kreatif. Dari *Hacking Conflict* object apa yang bisa diteliti sebagai materi seni. Apakah artefaknya, idenya, atau proses resolusi konfliknya? Tidak ada informasi yang tegas mengenai itu.

Banyak karya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan, terlihat sangat kedodoran dalam menghadirkan empati yang menarik untuk diamati. Atmosphere pameran secara umum mengingatkan pameran pembangunan oleh departemen penerangan zaman Soeharto. Ingin menghadirkan rupa-rupa informasi, tetapi tanpa integrasi substansi yang memudahkan penonton untuk berdecak kagum.

Sepi Pengunjung

Lebih parah lagi adalah mengenai pilihan tempat (*venue* yang cenderung nomaden dari

Biennale satu ke yang lain. Akibatnya sosok Biennialenya, sebagai pameran seni rupa akbar, tidak pernah terbentuk secara monumental dan informatif kepada masyarakat. Akibat berikutnya, 'Biennale Jogja' XIII sepi pengunjung. Bisa karena kurang publikasi, bisa juga publikasi cukup gencar, tetapi masyarakat terlanjur 'kapok', objeknya tidak menarik. Ketika penulis menyempatkan nonton di hari ketiga siang hari, ternyata hanya menjadi penonton tunggal di seantero ruangan, tragis memang.

Untuk itu redefinisi 'Biennale Jogja' dirasa sangat mendesak untuk mempertanyakan: sebagai salah satu kebijakan publik sudah saatnya 'Biennale Jogja' perlu pola monitoring dan evaluasi yang konstruktif. Apa urgensinya kita meneruskan ide Ekuator yang melelahkan itu? Atas dasar apa kita harus melanjutkan ide itu? Siapa yang berhak menilai keberhasilan dan kegagalan 'Biennale Jogja'? Selama masih menggunakan predikat Jogja maka masyarakat Yogya, seniman Yogya, perupa Yogya berhak menilai mengkritik 'Biennale Jogja'. Tetapi bagaimana cara menyampaikannya? □ - s.

*) Prof Dr Tulus Warsito,

Perupa, Ikut Merintis 'Biennale Jogja' Pertama, Guru Besar Diplomasi Kebudayaan dan Politik Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.